

## PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI DASAR PERENCANAAN INTERVENSI SOSIAL DI KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

Rahma Widya Aprilia <sup>1</sup>, Septa Dwi Prayoga <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga 1, Jl. Lkr. Sel. Salatiga No. Km. 2, Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716

Email : [rahma.widya007@gmail.com](mailto:rahma.widya007@gmail.com) <sup>1</sup>, [septadwi314@gmail.com](mailto:septadwi314@gmail.com) <sup>2</sup>

### ABSTRAK

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Tujuan</b>                  | Pengabdian berbasis pendataan penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan intervensi sosial  |
| <b>Metodologi</b>              | Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode survey, dimana data dikumpulkan melalui sistem <i>door to door</i> dengan mengunjungi penyandang disabilitas dan mengisi kuesioner terstruktur.   |
| <b>Hasil</b>                   | Penelitian dan pendataan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga berkolaborasi dengan Dinas Sosial yang bertempat di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, melakukan pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Bawen, meliputi 7 desa dan 2 kelurahan. Subjek mencakup disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, anak dan lansia terlantar, serta warga binaan. Tujuan pendataan adalah mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan akses layanan publik. Dari data awal 232 orang, hasil KKN mencatat 261 orang karena pembaruan. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya data awal, sikap tertutup keluarga, dan hambatan komunikasi. Namun, pendataan ini menghasilkan data yang lebih valid untuk dasar perencanaan intervensi sosial yang tepat. |
| <b>Keterbatasan Penelitian</b> | Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pendataan sehingga data yang didapatkan belum menjangkau seluruh keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.   |
| <b>Kata kunci</b>              | <i>Penyandang disabilitas, intervensi sosial, metode survey.</i>  |

### ABSTRACT

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Purpose</b> | Community service based on data collection of people with disabilities as a basis for planning social interventions |
|----------------|---|



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Methodology</b>          | The research method used is a quantitative-descriptive approach with a survey method, where data is collected through a door-to-door system by visiting people with disabilities and filling out structured questionnaires.   |
| <b>result</b>               | This research and data collection was conducted by UIN Salatiga KKN students in collaboration with the Social Service located in Bawen District, Semarang Regency, conducting data collection on people with disabilities in Bawen District, covering 7 villages and 2 sub-districts. Subjects included physical, sensory, intellectual, mental disabilities, neglected children and elderly, and inmates. The purpose of the data collection was to determine the social, economic, and access to public services conditions. From the initial data of 232 people, the KKN results recorded 261 people due to updates. The challenges faced included lack of initial data, closed family attitudes, and communication barriers. However, this data collection produced more valid data for the basis of planning appropriate social interventions. |
| <b>Research Limitations</b> | This study had limited data collection time so that the data obtained did not reach all families who had family members with disabilities.  |
| <b>Key words</b>            | <i>Disability Data Collection, Social Intervention, Survey Methods.</i>   |

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki beragam kelebihan dan kekurangan. Keberagaman itu untuk saling mengenal serta untuk saling tolong menolong satu sama lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia. Didalam ide negara hukum jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang utama yang harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstaat (Assiddiqie, 2012). Karena dari perlindungan yang baik maka akan tercapainya tujuan dari bernegara. Setiap manusia memiliki hak masing – masing bahkan sejak dari lahir. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara fisik sempurna, tetapi bagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau biasa kita kenal dengan cacat atau penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia khususnya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kaum disabilitas, maka diperlukan seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap, dan pro disabilitas serta masyarakat yang terbuka terhadap isu disabilitas (Hamidi, 2016).

Desiningrum (2016) mengklasifikasikan 3 jenis penyebab seseorang mengalami disabilitas, yaitu pra-lahir, saat lahir, dan pasca-lahir. Disabilitas pra-lahir adalah kondisi kelainan yang terjadi di dalam kandungan, biasanya disebabkan oleh faktor genetik, kurangnya gizi pada ibu hamil, atau adanya kecelakaan yang terjadi selama masa kehamilan. Disabilitas saat lahir

adalah kondisi kelainan yang terjadi saat proses persalinan berlangsung, biasanya disebabkan oleh kelahiran prematur, pertolongan persalinan yang salah, ataupun proses lahirnya bayi yang sulit. Disabilitas pasca-lahir adalah kelainan yang terjadi setelah anak dilahirkan, biasanya disebabkan oleh kecelakaan atau adanya penyakit tertentu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (2019) mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam tiga jenis, yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Disabilitas fisik adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada fungsi tubuh, seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Disabilitas mental adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam fungsi mental dan tingkah laku. Disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan fisik dan kecacatan mental sekaligus.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas menjadikannya memiliki hambatan dan keterbatasan dalam beberapa fungsi. World Mental Health (2011) menyebutkan tiga hambatan dan keterbatasan fungsi yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu *impairment*, *activity limitations*, dan *participation restriction*. *Impairment* adalah hambatan yang berupa gangguan fungsi tubuh atau berubahnya struktur tubuh, misalnya lumpuh dan keterbatasan penglihatan. Hambatan yang berupa *impairment* ini tegaskan oleh penelitian yang dilakukan Rahmah (2019) yang menyebutkan bahwa salah satu keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah keterbatasan penglihatan, yang menyebabkan terganggunya aktivitas penglihatan seperti mengenali wajah seseorang, melihat benda, membaca buku, dan berkendara. *Activity limitations* adalah hambatan yang berupa kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan dan berjalan. Penelitian yang dilakukan Ningsih dan Susanti (2019) memperkuat adanya hambatan berupa *activity limitations* yang dialami oleh penyandang disabilitas, dalam penelitiannya disebutkan bahwa kondisi disabilitas menyebabkan penyandang kehilangan kemandirian melakukan berbagai aktivitas sehingga harus bergantung pada orang lain. *Participation restriction* adalah hambatan yang berupa keterbatasan untuk terlibat dan memiliki peran di masyarakat. Santoso dan Apsari (2017) menyebutkan bahwa masyarakat cenderung tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, kondisi ini menyebabkan penyandang disabilitas merasa diasingkan kemudian menarik diri dari lingkungannya. Adanya keterbatasan dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas membuatnya merasa tertekan, stres, rendah diri, dan merasa hidupnya kesepian (Rahmah, 2019).

Penyandang disabilitas cenderung dianggap sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu meraih kesuksesan, dan tidak mampu melakukan berbagai aktivitas oleh lingkungan masyarakatnya (Putra, 2018). Diskriminasi dari masyarakat pun sering dialami dan dirasakan oleh penyandang disabilitas (Apsari & Mulyana, 2018). Masyarakat cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang kurang produktif (Widyastutik, 2021) serta tidak mampu melakukan beberapa aktivitas yang memerlukan fungsi fisik (Putra,dkk, 2021). Pandangan negatif lainnya yang diberikan masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah berkaitan dengan kemandiriannya, keterbatasan untuk mandiri ini menyebabkan penyandang disabilitas memiliki harga diri dan penerimaan diri yang rendah (Zaelani,dkk, 2022).

Oleh karena itu, dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang kebetulan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang oleh mahasiswa khususnya fakultas dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dengan melaksanakan pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya data yang akurat untuk merancang kebijakan dan program intervensi sosial yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, kelompok ini masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan peluang kerja karena belum adanya basis data yang valid dan komprehensif di tingkat kecamatan.

Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan secara door-to-door dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Pendataan ini mencakup informasi terkait jenis disabilitas, kondisi kesehatan, kebutuhan sosial, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendorong terciptanya pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Kecamatan Bawen.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode survey. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjelaskan, menggambarkan, atau menguji hubungan antar variabel secara objektif (Sugiyono, 2021). Dengan pendekatan ini, fenomena sosial seperti jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas dapat diukur secara terstruktur sesuai dengan instrumen penelitian, sehingga menghasilkan data yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan intervensi sosial oleh pemerintah setempat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasi ini dipilih karena data yang tersedia belum detail dan belum terperinci mengenai penyandang disabilitas sebagai dasar untuk melakukan intervensi sosial. Populasi penelitian mencakup seluruh penyandang disabilitas yang berdomisili di Kecamatan Bawen. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah total sampling, sehingga seluruh individu yang memenuhi kriteria.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke rumah penyandang disabilitas, serta melakukan pengecekan data terbaru dengan perangkat desa untuk memastikan keakuratan data. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai identitas yang bersangkutan, jenis disabilitas, kondisi sosial dan ekonomi, serta dokumentasi yang diperlukan sebagai pendukung data. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif-deskriptif dengan menyajikan hasil dalam bentuk tabel, sehingga dapat memberikan gambaran distribusi jumlah, jenis disabilitas yang berdomisili di masing-masing desa di Kecamatan Bawen.

## HASIL

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya berfokus pada penelitian tetapi lebih tepatnya juga melakukan sebuah pendataan penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Bawen. Pendataan ini berfokus di 7 Desa dan 2 Kelurahan, yakni: Desa Asinan, Desa Dopleng, Desa Lemahireng, Desa Kandangan, Desa Polosiri, Desa Poncoruso, Desa Samban, Kelurahan Bawen, dan Kelurahan Harjosari. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek yaitu mencakup penyandang disabilitas fisik, sensorik (seperti tuna netra dan tuna rungu), disabilitas intelektual, maupun disabilitas mental, anak dan lanjut usia terlantar, dan serta warga binaan masyarakat. Mereka menjadi fokus utama karena tujuan pendataan ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan aksesibilitas mereka terhadap layanan publik serta intervensi sosial yang dibutuhkan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan subjek pendukung seperti keluarga dari penyandang disabilitas yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai kebutuhan dan hambatan yang dihadapi anggota keluarga mereka. Di samping itu, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan petugas dari dinas sosial atau tim TKSK dari Kecamatan setempat juga dijadikan informan kunci dalam proses pendataan. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan data administratif, mendukung proses identifikasi, serta menjelaskan berbagai upaya dan program yang telah maupun sedang dijalankan terkait kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan melibatkan berbagai subjek tersebut, penelitian dalam program KKN ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan akurat mengenai kondisi nyata penyandang disabilitas di masyarakat.

Dalam melakukan pendataan khususnya di Kecamatan Bawen sudah memiliki gambaran yakni data awal dari Dinas Sosial sendiri terdapat 232 orang. Dengan adanya program KKN ini dapat memperoleh data sebanyak 261 orang baik itu tambahan beberapa pemerintah desa yang kebetulan namanya belum terdaftar dan pengurangan karena beberapa ada keterangan yang sudah meninggal dunia dan pindah domisili. Berikut lampiran untuk daftar Desa, jumlah penyandang disabilitas yang sudah melakukan pendataan dan beberapa dokumentasi telah melakukan pendataan, yaitu sebagai berikut:

**Table 1.** Hasil Pendataan Penyandang Disabilitas Kec. Bawen

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah   |
|----|---------------------|----------|
| 1. | Asinan              | 59 orang |
| 2. | Harjosari           | 30 orang |
| 3. | Dopleng             | 64 orang |
| 4. | Kandangan           | 2 orang  |

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| 5. | Lemahireng | 24 orang |
| 6. | Polosiri   | 24 orang |
| 7. | Bawen      | 8 orang  |
| 8. | Poncoruso  | 17 orang |
| 9. | Samban     | 33 orang |



Gb. 1 Dokumentasi pendataan di Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kec. Bawen, Kab. Semarang

Sumber: Dokumentasi pribadi Rabu, 10 Juni 2025 – Rabu, 25 Juni 2025

Selain itu dalam pelaksanaan pendataan penyandang disabilitas, mahasiswa KKN menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya data awal dan informasi yang akurat mengenai jumlah serta jenis disabilitas yang ada di masyarakat. Banyak desa belum memiliki data terperinci tentang warganya yang menyandang disabilitas, sehingga mahasiswa harus memulai dari nol, termasuk dengan melakukan pendekatan langsung ke rumah-rumah warga. Hambatan lainnya adalah kurangnya keterbukaan dari beberapa keluarga atau individu penyandang disabilitas. Beberapa di antaranya

masih merasa malu atau takut terhadap stigma sosial, sehingga enggan memberikan informasi yang sebenarnya. Kendala komunikasi juga muncul ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas tertentu, seperti tuna rungu atau tuna wicara, yang memerlukan cara komunikasi khusus. Dengan adanya proses pendataan tersebut menjadi lebih lancar dan hasilnya pun lebih valid serta bermanfaat untuk perencanaan intervensi sosial yang tetap sasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pendataan yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Bawen, ditemukan bahwa jumlah penyandang disabilitas sudah tersebar di seluruh desa dengan jumlah yang berbeda di setiap desa/kelurahan. Desa Doplang tercatat sebagai desa dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi, sedangkan Desa Kandangan tercatat sebagai desa dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit. Adanya perbedaan jumlah di setiap desa/kelurahan disebabkan karena jumlah penduduk, kondisi lingkungan, dan keakuratan data yang didapat dari laporan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas.

Perbedaan jumlah penyandang disabilitas antar desa/kelurahan ini disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk, perbedaan akses layanan kesehatan yang didapatkan, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terutama yang mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas, mengenai pentingnya pendataan disabilitas. Temuan ini juga menunjukkan masih adanya kemungkinan kasus disabilitas yang belum terdata secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan waktu pendataan dan adanya keluarga yang kurang berkenan untuk didata akibat stigma dan norma sosial masyarakat mengenai penyandang disabilitas.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Fajar dengan Judul Penelitian “Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone”, yang hanya memfokuskan pendataan pada identifikasi jumlah penyandang disabilitas secara umum tanpa ada klasifikasi secara detail. Sehingga, data yang dihasilkan belum dapat digunakan untuk merancang program intervensi sosial secara spesifik dengan menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil pendataan yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Bawen menghasilkan data yang lebih rinci dan lebih mendetail mengenai klasifikasi jenis disabilitas dan jumlah per desa/kelurahan. Sehingga, dari hasil ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun program intervensi sosial yang lebih akurat dengan menyesuaikan data yang dihasilkan dengan tepat sasaran.

Hasil pendataan ini juga menegaskan bahwa data sebelumnya kurang akurat sehingga menjadi kendala utama dalam perencanaan intervensi sosial. Melalui data terbaru yang sudah didapatkan, terdapat beberapa kendala lainnya yakni keluarga penyandang disabilitas, adanya kendala komunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu yang tidak memiliki keluarga, dan beberapa keluarga masih merasa malu dengan stigma masyarakat mengenai disabilitas. Kendala kendala ini perlu menjadi perhatian agar pendataan yang serupa dapat dilakukan dengan inovasi



yang lebih baik melalui sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

## REFERENSI

- Assiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negaradan Pilar – Pilar Demokrasi*, Ed.2, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika
- Desiningrum, D. R. (2016). *Psikologi anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Psikosain
- Fajar. (2022). *Pelaksanaan hak pendataan sebagai dasar penilaian pemenuhan hak penyandang disabilitas atas kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone*. Fajar Vox Populi, 5(2), 221–242.
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum lus Quia lustum* Vol. 23, (No.4), pp. 120-130. <https://journal//.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7632>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Pengertian, Jenis, dan Hak Penyandang Disabilitas*. Sistem Perlindungan Anak Berkubutuhan Khusus.
- Ningsih, F., & Susanti, S. S. (2019). Psychological well-being pada penyandang disabilitas fisik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 4(1), 87-94.
- Nurhayati, S., & Haryani, A. (2019). *Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam perspektif konvensi internasional dan hukum nasional*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(1), 1–12.
- Putra, A. (2018). Self-esteem pada penyandang disabilitas fisik pasca kecelakaan Academia: *Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1). 107-109.
- Putra, dkk. (2021). Pesan kesetaraan penyandang disabilitas melalui interaksi simbolik media sosial. *Iteraksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1-11. doi: 10.14710/iteraksi.10.1.1-11.
- Rahmah. (2019). Penerimaan diri bagi penyandang disabilitas netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2).
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. Doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan masyarakat: Mungkinkah memberdayakan masyarakat?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyastutik, C. (2021). *Makna stigma sosial bagi disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*, *Paradigma*, 10(1),1-23.
- World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. WHO Press.
- Zaelani, D. A., dkk. (2022). Tantangan dan peluang penyandang disabilitas fisik di kota Bandung dalam memperoleh pekerjaan dimasa covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 15(1), 16-29, doi: 10.12962/j24433527.V1511.13133